



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar. 97464.
Telp. 0811 4840 222 www.kejari-malukutenggarabarat.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : KEP-48/Q.1.13/Cr.5/03/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.
- KESATU : Menetapkan 4 (Empat) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodik setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 04 Maret 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



DADI WAHYUDI, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19771207 199903 1 003



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Nomor : KEP-48/Q.1.13/Cr.5/03/2024
Tanggal : 04 Maret 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Standar Pelayanan

| | |
|--|---|
| 1. Standar Pelayanan PTS | 4 |
| 2. Standar Pelayanan Tilang..... | 5 |
| 3. Standar Pelayanan Barang Bukti | 6 |
| 4. Standar Pelayanan Informasi Publik..... | 7 |
| 5. Standar Pelayanan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum | 8 |



LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Nomor : KEP-48/Q.1.13/Cr.5/03/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------|---|--|
| A | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery) | |
| 1. | Produk Pelayanan | Pelayanan Hukum dan pelayanan Tamu |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | Masyarakat membawa kartu Identitas (KTP/SIM) |
| 3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Masyarakat datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melapor ke Petugas Piket (Satpam) untuk meninggalkan barang bawaan ke loker tamu kemudian diarahkan ke PTSP, mengisi buku Tamu, mengisi plat kendaraan bermotor bagi yang membawa kendaraan, menunggu untuk konfirmasi kepada yang bersangkutan di ruang tunggu yang telah disediakan, petugas PTSP menghubungi pejabat yang ingin ditemui sampai pejabat yang ingin ditemui datang ke ruang tunggu yang telah disediakan. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Disesuaikan dengan kebutuhan |
| 5. | Biaya/Tarif | Gratis |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Call Centre : 08114840222 Website : https://kejarikabupatenkeptanimbar.kejaksaan.go.id Facebook : Kejaritanimbar Instagram : kejaritanimbar |
| B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) | |
| 1. | Dasar Hukum | UU nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik mengacu pada service excellent yang diberikan oleh instansi Layanan Publik kepada Masyarakat. |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Ruang tunggu dengan sofa yang nyaman, tv dan minuman, toilet |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Pegawai minimal berpangkat II/a dan pegawai PPNPN minimal S1 dengan kemampuan Bahasa yang baik dan pengetahuan informasi yang baik |
| 4. | Pengawasan Internal | 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 1 orang PNS, 2 orang PPNPN |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Hasil survei Pelayanan PTSP pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar |



LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Nomor : KEP-48/Q.1.13/Cr.5/03/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN
TILANG

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------|---|---|
| A | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery) | |
| 1. | Produk Pelayanan | Mengembalikan Barang bukti tilang berupa kendaraan bermotor atau dokumen (SIM/STNK) |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | Para Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan membawa bukti surat tilang dan bukti pembayaran. |
| 3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Para Pelanggar Tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan membawa blanko tilang, mendaftar ke loket tilang untuk mendapatkan nomor antrian, setelah mendapatkan giliran menuju ke loket petugas tilang untuk mendapatkan kode pembayaran denda dan biaya tilang dan selanjutnya membayar melalui bank terdekat. Pelanggar yang sudah membayar denda dan biaya tilang untuk mengambil barang bukti (SIM/STNK) cukup membawa slip setoran kepada petugas tilang untuk ditindaklanjuti. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Sesuai kebutuhan atau (5 menit) |
| 5. | Biaya/Tarif | Ditentukan sesuai tarif Penggunaan Sarana Pembayaran dan biaya Perkara Rp. 1.000.- |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Call Centre : 08114840222 Website : https://kejarikabupatenkeptanimbar.kejaksaan.go.id Facebook : Kejaritanimbar Instagram :kejaritanimbar |
| B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) | |
| 1. | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan • Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerima Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. • Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tegas Sapu Bersih Pungutan Liar. • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. • Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Dan Kapolri Tanggal 19 Juni 1993 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu, • Kesepakatan Bersama Tentang Penggunaan Jasa Bri Dalam Penerimaan Uang Titipan, Pembayaran Denda Dan Biaya Perkara Tilang Tanggal 15 Juli 1993. • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. |



| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengacu pada service excellent yang diberikan oleh instansi publik kepada masyarakat. |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Ruang tilang dilengkapi dengan kursi tunggu, komputer dan laptop serta printer. |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Memahami SOP Tilang dan mampu berkomunikasi dengan baik. |
| 4. | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 2 (dua) orang atau sesuai kebutuhan |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat Pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Hasil survei pelayanan tilang pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. |



LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Nomor : KEP-48/Q.1.13/Cr.5/03/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN
BARANG BUKTI

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------|---|--|
| A | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery) | |
| 1. | Produk Pelayanan | Pengambilan dan pengantaran barang bukti |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan membawa kartu identitas (KTP/SIM) dan bukti putusan pengadilan serta surat-surat terkait barang yang akan diambil. |
| 3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Masyarakat datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melapor ke Petugas Piket (Satpam) untuk meninggalkan barang bawaan ke loker tamu kemudian diarahkan ke PTSP, mengisi buku Tamu, mengisi plat kendaraan bermotor bagi yang membawa kendaraan, menunggu untuk konfirmasi kepada yang bersangkutan di ruang tunggu yang telah disediakan, petugas PTSP menghubungi bagian Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Sesuai kebutuhan |
| 5. | Biaya/Tarif | Gratis. |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Call Centre : 08114840222 Website : https://kejarikabupatenkeptanimbar.kejaksaan.go.id Facebook : Kejaritanimbar Instagram : kejaritanimbar |
| B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) | |
| 1. | Dasar Hukum | Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Ruang tunggu, Sofa, Meja, Ruang Ber AC, Minuman |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Jaksa yang menangani perkara yang dimaksud, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Staf yang memiliki pengetahuan informasi yang detail terkait barang bukti dan memiliki kemampuan bahasa yang baik. |
| 4. | Pengawasan Internal | 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| 5. | Jumlah Pelaksana | Satu (satu) orang Jaksa yang menangani perkara yang dimaksud, 1 (satu) orang Kepala Seksi PB3R, 2 (dua) orang staf seksi PB3R. |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat Pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Hasil survei pelayanan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. |



LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Nomor : KEP-48/Q.1.13/Cr.5/03/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN HUKUM

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------|---|--|
| A | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery) | |
| 1. | Produk Pelayanan | Pemberian informasi terkait permasalahan hukum |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | Masyarakat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan membawa kartu identitas (KTP/SIM). |
| 3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Masyarakat datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melapor ke Petugas Piket (Satpam) untuk meninggalkan barang bawaan ke loker tamu kemudian diarahkan ke PTSP, mengisi buku Tamu, mengisi plat kendaraan bermotor bagi yang membawa kendaraan, menunggu untuk konfirmasi kepada yang bersangkutan di ruang tunggu yang telah disediakan, petugas PTSP menghubungi bagian Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Sesuai kebutuhan |
| 5. | Biaya/Tarif | Gratis. |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Call Centre : 08114840222 Website : https://kejarikabupatenkeptanimbar.kejaksaan.go.id Facebook : Kejaritanimbar Instagram : kejaritanimbar |
| B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) | |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Ruang tunggu, Sofa, Meja, Ruang Ber AC, Minuman |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Staf yang memiliki pengetahuan terkait hukum-hukum yang berlaku |
| 4. | Pengawasan Internal | 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, 2 (dua) orang Staf Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Memberikan pemahaman terkait permasalahan hukum yang dihadapi Masyarakat. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Hasil survei layanan Pelayanan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. |



LAMPIRAN VI

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Nomor : KEP-48/Q.1.13/Cr.5/03/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN
LAPORAN PENGADUAN

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------|---|---|
| A | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery) | |
| 1. | Produk Pelayanan | Pelayanan Informasi Publik berupa permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | Masyarakat memiliki data diri dan data dukung terkait jika ada pengaduan. |
| 3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | Masyarakat datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, melapor ke Petugas Piket (Satpam) untuk meninggalkan barang bawaan ke loker tamu kemudian diarahkan ke PTSP, mengisi buku Tamu, mengisi plat kendaraan bermotor bagi yang membawa kendaraan, menunggu untuk konfirmasi kepada yang bersangkutan di ruang tunggu yang telah disediakan, petugas PTSP menghubungi bagian Seksi Intelijen. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Sesuai kebutuhan |
| 5. | Biaya/Tarif | Gratis. |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Call Centre : 08114840222 Website : https://kejari-kabupatenkeptanimbar.kejaksaan.go.id Facebook : Kejaritanimbar Instagram : kejaritanimbar |
| B | Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) | |
| 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; |
| 2. | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | Ruang tunggu, Sofa, Meja, Ruang Ber AC, Minuman |
| 3. | Kompetensi Pelaksana | Kepala Seksi Intelijen, Staf yang memiliki pengetahuan terkait hukum-hukum yang berlaku |
| 4. | Pengawasan Internal | 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar |
| 5. | Jumlah Pelaksana | 1 (satu) orang Kepala Seksi Intelijen, 3 (tiga) orang Staf Intelijen |
| 6. | Jaminan Pelayanan | Menyampaikan hal-hal sebagaimana mestinya secara terbuka dan dapat dipahami masyarakat. |
| 7. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan. |
| 8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Hasil survei layanan Pelayanan Hukum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. |

